

Sekolah Demokrasi

Meretas Jalan Menuju Wajah Demokrasi yang Lebih Kuat dan Multikulturalisme yang Nyata*

Ada beragam paham demokrasi di dunia. Walaupun demikian, ada dua ciri utama dari semua jenis demokrasi, yaitu bahwa mereka mempunyai baik unsur-unsur universal maupun elemen-elemen lokal yang tak terhindarkan harus turut diperhitungkan pada saat suatu sistem demokrasi beroperasi. Menyadari ciri-ciri demokrasi ini, para pendiri KID memilih untuk mewadahi berlangsungnya suatu proses dialektika dinamis antara kedua elemen demokrasi itu. Suatu dialog kontekstual yang saling memperkaya antara keduanya dikelola dengan dada lapang. Demokrasi jenis ini dinamakan oleh KID sebagai demokrasi kontekstual.

Multikulturalisme—didefinisikan secara umum oleh banyak kalangan sebagai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain—adalah sebuah tema yang relatif baru dibicarakan di negeri ini. Sebagai sebuah tema, multikulturalisme dibicarakan umumnya dalam kerangka mengunjungi kembali (*revisiting*) dan menemukan kembali (*reinventing*) gagasan-gagasan yang lebih masuk akal tentang bagaimana sebuah masyarakat majemuk di Indonesia ini dapat dikembangkan dalam sebuah konsepsi masyarakat “warna-warni” yang tidak saja berciri partisipatoris namun juga emansipatoris.

Berbeda dengan pluralisme yang menekankan pada perbedaan ide, multikulturalisme berkenaan dengan perbedaan yang bersumber terutama pada identitas etnik dan agama. Sebagai misal, orang bisa berasal dari etnik dan agama yang sama namun memiliki orientasi politik yang berbeda. Namun, sangat jelas bahwa di antara etnik dan penganut agama yang berbeda selalu dapat ditemukan identitas sosial dan budaya yang berbeda, dari yang sangat simbolik hingga yang sangat nyata. Identitas kelompok etnik dan agama, oleh karena itu, adalah sebuah entitas sosial dan budaya yang sering melampaui batas-batas kelas, gender, dan ideologi politik.

Dalam konteks Indonesia, maka sejak reformasi digulirkan 1998, maka demokrasi merupakan kerangka kerja politik yang dipilih dimana multikulturalisme tidak menjadi penghambat bagi cita-cita bersama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bahkan sebaliknya dapat menjadi sumber energi yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah-masalah bangsa.

Kesadaran semacam itu sangat jelas terlihat sejak awal pendirian republik ini. Bhinneka Tunggal Ika (“berbeda-beda namun satu jua”) adalah prinsip yang mencoba menekankan cita-cita yang sama dan kemajemukan sebagai perekat kebangsaan. Dalam prinsipnya, etika ini meneguhkan pentingnya komitmen negara untuk memberi

ruang bagi kemajemukan pada satu pihak dan pada pihak lain pada tercapainya cita-cita akan kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dari tujuan nasionalisme Indonesia.

KID percaya bahwa melalui Sekolah Demokrasi semangat multikulturalisme dapat memperkuat perjuangan demokrasi. Ini mungkin yang bisa disebut Demokrasi dengan perspektif atau semangat multikulturalisme.

Tujuan Utama dan Sifat KID

Terwujudnya kedaulatan rakyat substantif di tingkat lokal adalah tujuan utama KID agar keterwakilan politik, keterjangkauan politik, komunikasi politik maupun akuntabilitas politik antara rakyat dengan ketiga pilar demokrasi yang lain dapat terjamin keberlangsungannya secara dinamis. Pemastian adanya akuntabilitas politik itu diusahakan lewat penciptaan sistem, mekanisme serta instrumen demokrasi kontekstual yang membuka ruang dan peluang interaksi-politik *bermakna* antara rakyat dengan lembaga politik, komunitas bisnis serta para pelaku politik. Untuk itu perlu dibangun kesadaran, pengetahuan dan keterampilan politik dari masyarakat. Agar mereka dapat memajukan dan menggunakan berbagai instrumen demokrasi untuk memenuhi kepentingan mereka. Pendidikan politik menjadi satu program yang harus dilaksanakan bagi semua lapisan masyarakat, bila kita menginginkan makna inti demokrasi terwujud, yakni kontrol rakyat atas kebijakan-kebijakan publik.

Dalam perspektif itu, KID turut mengambil bagian dalam kerja besar pendidikan politik. Peranan KID diwujudkan melalui upaya (a) membangun fasilitas dan forum pencerahan nilai-nilai dan tradisi demokrasi serta latihan penguasaan dan pemanfaatan mekanisme serta instrumen demokrasi; (b) menyelenggarakan forum dialog dan refleksi atas perkembangan demokrasi; (c) membangun *on-line knowledge system* untuk peminat, pakar dan praktisi demokrasi serta (d) mengadakan pertukaran pengetahuan dan pengalaman berdemokrasi. Maksud ini dicapai lewat kegiatan utama: penyelenggaraan pendidikan dan latihan, jejaring kemitraan, jejaring informasi, pendampingan, konsultasi dan mediasi, seminar, penerbitan berbagai bentuk publikasi serta kajian demokrasi.

Sebagai suatu perkumpulan KID bersifat terbuka. KID memperlakukan setiap pihak dari berbagai ras, suku, agama, warna kulit, aliran politik, jender, orientasi seksual, latar sosial-ekonomi maupun keunikan bawaan secara setara dalam penerimaan anggota, mitra-kerja maupun pelayanannya. Juga KID bersifat non-profit dan lebih mengupayakan inovasi kebijakan, program maupun kegiatan yang dijiwai nilai-nilai demokrasi universal dengan memanfaatkan perangkat-perangkat budaya lokal yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat secara kontekstual.

Program dan Sasaran Sekolah Demokrasi

Para peserta Sekolah Demokrasi adalah orang muda yang terdiri dari politisi, tokoh masyarakat, jurnalis, aktivis LSM, pendidik, pebisnis, dan kalangan profesional lainnya. Sekolah Demokrasi menetapkan sasaran pada tingkat institusional dan individual. Pada tingkat institusional, Sekolah Demokrasi di setiap lokasi diharapkan 1) menghasilkan data base dinamis dan pemetaan komprehensif mengenai kabupaten di mana Sekolah

Demokrasi tersebut beroperasi, 2) meluluskan orang-orang muda strategis yang mempunyai kemampuan dan komitmen. Jumlah lulusan ini secara proporsional sedikitnya 50% dari jumlah anggota DPRD setempat, 3) merancang dan mengembangkan Komite Komunitas yang akan menjadi wahana bagi para aktor dalam transformasi demokrasi di tingkat lokal, 4) memfasilitasi jaringan dinamis antara pilar-pilar demokrasi lokal di antaranya lembaga politik, politisi, komunitas bisnis, media massa, dan tokoh masyarakat setempat.

Selanjutnya pada tingkat individual, di akhir program Sekolah Demokrasi, para peserta diharapkan 1) mengembangkan kemampuan berinteraksi di antara pilar-pilar demokrasi baik dalam arena politik lokal maupun nasional, 2) mengembangkan nilai-nilai, pengetahuan dan ketrampilan demokrasi, 3) mengartikulasikan agenda demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional melalui penulisan lima artikel di media massa lokal, penyelenggaraan talk show di radio atau televisi lokal, program partisipasi publik, atau acara dengar pendapat di DPRD setempat, dan 4) merencanakan dan melaksanakan satu program atau kegiatan pengembangan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Demokrasi, KID mengembangkan beberapa modul yang bisa digunakan untuk para peserta. Modul-modul tersebut adalah 1) Perkembangan Pemikiran dan Praktik Demokrasi yang disusun oleh Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, 2) Sistem Politik dan Pemerintahan oleh Arbi Sanit, Ichlasul Amal, dan Rahman Tolleng, 3) Gerakan Sosial, oleh Suharko, 4) Kebijakan Publik oleh Eny Haryati, 5) Konsepsi Demokrasi oleh Daniel Sparringa dan Ignas Kleden, 6) Demokrasi dan HAM oleh Ruhaini Dzuhayatin dan Kumala Sari, 7) Demokrasi dan Hukum oleh Muhammad Fajrul Falaakh, 8) Analisis Kemasyarakatan oleh Heru Nugroho, 9) Demokrasi dan Bisnis oleh Ratih Hardjono dan Anita Lie.

Disunting dan didesain oleh Anita Lie, modul-modul tersebut dirancang sebagai referensi bagi setiap Sekolah Demokrasi dan memberikan banyak ruang bagi transformasi nilai-nilai, pengetahuan, dan ketrampilan demokrasi untuk para peserta sebagai kelompok maupun pribadi pada tingkat kabupaten. Kegiatan-kegiatan yang diintegrasikan dalam modul mendorong para peserta, fasilitator, dan nara sumber untuk menggali kearifan lokal, memahami kebutuhan di setiap kabupaten, dan mencari solusi atas permasalahan dalam kerangka nilai-nilai demokrasi yang universal.

Operasionalisasi berbagai kegiatan Sekolah Demokrasi sangat diwarnai dengan konteks budaya dan kebutuhan setempat. Masing-masing Sekolah Demokrasi di setiap kabupaten mempunyai keunikannya sendiri untuk mencapai tujuan bersama, yakni meningkatkan kualitas partisipasi politik dalam transformasi masyarakat yang demokratis. Berikut adalah Sekolah Demokrasi yang dilaksanakan KID bekerjasama dengan lembaga lokal sejak tahun 2006:

Malang

Public Policy Analysis and Community Development Studies (PLACID's) Averroes merupakan salah satu bagian dari Averroes Community, sebuah perkumpulan yang sudah bertahun-tahun berpengalaman dalam upaya-upaya penguatan wacana demokrasi dan pemberdayaan *civil society* khususnya di wilayah Malang Raya. Ada

kombinasi yang terdiri dari akademisi, peneliti, aktivis, politisi, dan administrator. Untuk alasan-alasan itulah, KID menilai PLACID's Averroes adalah lembaga yang tepat untuk melaksanakan penyelenggaraan Sekolah Demokrasi. Saat ini Placid's Averroes telah menyelesaikan Sekolah Demokrasi Kabupaten Malang dan sedang memulai Sekolah Demokrasi di Kota Batu. Sejauh ini telah meluluskan 89 alumuni.

Lembata

Dalam perjalanan tujuh tahun berpisah dari Kabupaten Flores Timur dan menjadi kabupaten sendiri, Lembata (di banyak peta masih disebut sebagai Pulau Lomblen) masih mempunyai banyak pekerjaan rumah dalam pengembangan infrastruktur masyarakat dan penguatan civil society. LAP Timoris dimotori oleh orang-orang muda yang mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap akar dan nilai-nilai budaya masyarakat Lamahelot di Lembata serta visi untuk membangun masyarakat demokrasi di masa depan. Jumlah alumni 114 orang.

Tangerang

Salah satu aspek budaya yang masih dominan adalah keberadaan jawara di dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Tangerang. Sebagai pemimpin informal dalam komunitas, para jawara sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di masyarakat. Maka dari itu, sebagian partai politik memperhitungkan posisi para jawara (selain tokoh-tokoh masyarakat lain seperti kyai, pengusaha dan yang lainnya) dalam penggalangan kader maupun dalam masa kampanye.

IRE (Institute for Research and Empowerment) dipilih sebagai lembaga pelaksana di Kabupaten Tangerang dengan karena organisasi ini mempunyai perspektif kritis, pengetahuan, dan pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan nilai inheren dalam demokrasi yaitu kemajemukan, otonomi, kemandirian, kesetaraan, persamaan, keadaban (*civility*), keterbukaan, anti-kekerasan, anti-dominasi dan anti-diskriminasi. Jumlah alumni 71 Orang.

Banyuasin

Berbagai persoalan politik muncul di kabupaten baru ini, misalnya isu putra daerah dalam menentukan pimpinan tertinggi di daerah. Dalam rekrutmen partai politik, ternyata para calon anggota dewan memiliki latar belakang pendidikan yang relatif rendah sehingga mempengaruhi mutu keputusan-keputusan yang diproduksi. Bahkan, ditengarai beberapa produk hukum seperti Peraturan Daerah berupa hasil *copy-paste*.

Dalam kondisi tersebut, Yayasan Puspa dipilih sebagai mitra lokal KID karena pengalaman dan kepedulian mereka terhadap pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan dan anak yang sering menjadi korban penyimpangan kebijakan publik. Pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak merupakan cermin kurang tersosialisasinya instrumen-instrumen hukum baik nasional maupun internasional yang melindungi hak perempuan dan anak. Jumlah alumni 71 orang.

Jeneponto

Pemilihan Jeneponto sebagai wilayah program dilakukan oleh mitra kami sebelumnya yaitu Melania Foundation yang saat ini sudah menyelesaikan masa kerjasamanya dengan kami. Jeneponto dipilih karena wilayah ini tidak hanya mempunyai keunikan budaya tetapi juga keunikan kondisi sosial ekonomi dan politik yang sangat diwarnai dengan budaya Turatea. Selain itu, Jeneponto sebagai sebuah wilayah yang amat homogen dan terkesan sulit untuk menerima perbedaan. Selama 3 tahun ini telah menghasilkan 90 orang.

Demokrasi dengan Semangat Multikulturalisme di Jeneponto

Di awal pelaksanaan program, Sekolah Demokrasi mendapat tantangan dan resistensi yang kuat dari sebahagian masyarakat Jeneponto yang beranggapan bahwa KID membawa konsep dan ide Barat yang bertentangan dengan agama Islam dan budaya lokal. Kami bahkan perlu datang dan bertemu Bapak Bupati untuk memberi penjelasan tentang maksud dan tujuan Sekolah Demokrasi ini. Masa tahun pertama pelaksanaan Sekolah Demokrasi, kami membuka secara luas kesempatan bagi semua pihak untuk menjadi peserta Sekolah Demokrasi, terutama untuk perempuan. Ternyata itu bukan sesuatu yang mudah. Melania terpaksa harus memperpanjang waktu rekrutmen agar lebih banyak perempuan yang mendaftar. Dan Sekolah Demokrasi Jeneponto pada akhirnya selalu dapat menjangkau perempuan-perempuan muda yang aktif di Jeneponto. Di dibandingkan dengan Sekolah Demokrasi yang lain, Jeneponto selalu mempunyai peserta perempuan dengan jumlah yang lebih banyak. Kalau di Sekolah lain mitra KID dapat menyeleksi 20 – 30% perempuan, Jeneponto mampu mendapatkan 50% perempuan. Ini tentu sebuah pencapaian yang gemilang di tengah kondisi di mana perempuan selalu dianggap kurang mampu dan tidak bisa aktif karena harus menjadi penjaga rumah di keluarga.

Setelah tiga tahun pelaksanaan Sekolah Demokrasi, banyak perubahan yang telah terjadi di Jeneponto. Masyarakat semakin sadar tentang arti politik yang selanjutnya mereka mampu berperan dalam proses politik di Jeneponto. Kegiatan Komite Komunitas Jeneponto berupa pendidikan politik kepada masyarakat telah pula meningkatkan kesadaran masyarakat tentang politik dan partai politik. Selain itu, saat ini sudah banyak alumni Sekolah Demokrasi yang menjadi Caleg (lebih dari 10 orang). Kita harapkan jika mereka nanti terpilih menjadi anggota DPR Jeneponto, mereka benar-benar bisa menjaga amanat dari masyarakat Jeneponto dan membawa perubahan kondisi Kabupaten Jeneponto yang lebih baik dan lebih terbuka.

Tidak hanya itu perubahan yang terjadi. Beberapa komentar dari orang luar Jeneponto yang pernah kami dengar adalah bahwa Jeneponto sudah semakin terbuka bagi warga luar Jeneponto. Misalnya ada salah satu teman dari anggota Badan Pengurus yang mempunyai usaha dagang di Makasar dan Jeneponto mengatakan bahwa jika 5 tahun lalu dia tidak akan berani membawa dagangan ke Jeneponto karena di tengah jalan dia akan dihadang orang tidak dikenal yang berusaha memalak barang dagangan. Sekarang, dia merasa aman-aman saja. Tentu saja harapan kita adalah keterbukaan ini tidak berhenti hanya disini, kita ingin melihat keterbukaan yang membawa manfaat bagi

masyarakat Jeneponto bukan hanya secara ekonomis, tetapi juga secara sosial dan politik.

Memajukan dan memperdalam demokrasi di tengah-tengah masyarakat Jeneponto dengan perspektif multikulturalisme akan membutuhkan waktu dan energi karena ini bukan sekedar langkah menyuguhkan warna-warni identitas tetapi lebih utama membangun kesadaran tentang pentingnya kelompok-kelompok etnis dan budaya agar memiliki kemampuan untuk berinteraksi dalam ruang bersama. Kata kunci dari pendekatan ini terletak pada usaha yang lebih sistematis untuk menyertakan pendekatan struktural politik dan ekonomi dalam proses itu. Ini berarti bahwa multikulturalisme membutuhkan pengintegrasian pendekatan lainnya selain budaya untuk memungkinkan tema-tema yang relevan di sekitar keadilan dan persamaan dapat menjadi faktor yang ikut memperkuat multikulturalisme. Ini menjadi sebuah tantangan bagi Sekolah Demokrasi Jeneponto untuk meretas jalan menuju demokrasi yang lebih kuat dan multikulturalisme yang nyata.

Jakarta, 23 Januari 2009

Asmara Nababan
Direktur Eksekutif (ad interim) KID

* Makalah ini menggunakan referensi TOR Payung Sekolah Demokrasi (oleh KID) dan artikel berjudul Multikulturalisme: Alat Analisis dan Agenda Aksi (oleh Daniel Sparringa). Dibat untuk seminar sosialisasi Sekolah Demokrasi Jeneponto yang diselenggarakan oleh LAPAR bekerjasama dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi pada tanggal 24 Januari 2009